

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundang - undangan

Undang - Undang Dasar 1945

UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://indonesia.iom.int/>

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jdih.bp2mi.go.id/>

UU keimigrasian bab 10, <https://www.imigrasi.go.id/>

UU no 27 tahun 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/>

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

### Buku

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Perlindungan TKI*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

- Andi Hamzah, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 88-89
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 44-5
- Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Chapter 23 : *Principles and Policies* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hlm. 23
- Andri Gunawan Wibisana dan Andreas Nathaniel Marbun, “*Corporate Criminal Liability in Indonesia AntiCorruption Law: Does It Work Properly?*” *Asian Journal of Law and Economics*”, Vol.8 No. 3, Desember 2017, hlm.2
- Anthony Terry Hanmer Smith, “*On Actus Reus and Mens Rea*”, Glazebrook, 1978, hlm. 95-96
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 23. Walau secara teori, doktrin ini memiliki pertentangan dengan konsep asas semua orang tahu hukum, atau yang biasa dikenal dengan ‘fiksi hukum’, namun hal tersebut nampaknya sekedar menjadi perdebatan teori saja.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 34
- C. T. Sistare, *Responsibility and Criminal Liability* (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1989) hlm.3
- Djoko Prakoso *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) hlm.75; *Baca pula Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 33
- Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.121.
- Fitri Wahyuni., 2017, *Dasar-Dasar hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, h. 67

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 21
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) hlm. 37
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61
- L. Radzinowicz dan J. W. G. Turner, *The Modern Approach to Criminal Law*, (London: The Macmillan Co. 1945) hlm. 196
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964) hlm.70.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm. 156
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 54
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.
- Paul H. Robinson, "Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus and Mens Rea Distinction?", dalam Stephen Shute, John Gardner, dan Jeremy Horder, *Action and Value in Criminal Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1993) hlm. 187
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, h.133
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 13
- R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in Criminal Law* (Portland: Hart Publishing, 2007) hlm. 58.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A -1 B*, (Purwokerto: Fak. Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991) hlm.32

Sutrisna dan I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 83

S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni AhaemPeteheam,1996) hlm .245

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hlm. 97; baca pula Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 86

## **Jurnal**

Atfri Makarawung, 9 November 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Pelanggaran atas Hak-hak Konsumen*, diakses tanggal 9 Maret 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>,

Atika Fauziati, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri*, hal.4, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com)

Faisol, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H., Faizin sulistio S.H., LLM, Tahun 2015, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terkait Tindak Pidana Perdagangan*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://media.neliti.com/media/publications>

Luthfi Febrika Nola, 2016, *Upaya perlindungan hukum secara terpadu untuk TKI*, diakses tanggal 17 November 2023, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum>.

Niswan Haref, Ica Karnia,tahun 2023, *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan TKI*, diakses 1 November 2023, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/>

Peni Susetyorini, 2018, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia*, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 1, 2010, diakses pada tanggal 14 Oktober 2023. <https://www.bing.com>

Redatin Parwadi, 2012, *Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri*, Vol.3, No.1, diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php>.

Wijayanti, Nidya and Febrian, Febrian and Nashriana, Nashriana (2023), *Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian* (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang), diakses tanggal 30 November 2023, Master thesis, Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/>

Zainal Arifin, Tahun 2006, *Tanggung jawab penyelenggara jasa penerah tenaga kerja indonesia dalam penempatan tenaga kerja di luar negri*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://repository.unair.ac.id>,

### Website

Andrian Pratama Taher, 20 April 2021, *jokowi teken pp perlindungan buruh migran dan tki dapat jaminan sosial*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://tirto.id/>

BBC NEWS, 31 Mei 2017, *Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>

Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, 15 Januari 2024, *unsur unsur dan bentuk pemalsuan dokumen*, diakses pada 15 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com>,

BP2MI, 2023, *Profil Sejarah Seseorang Menjadi TKI*, diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://bp2mi.go.id/>

BP2MI, 13 Mei 2011, *Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://bp2mi.go.id/>

Cahyu, 7 November 2017, *ancaman hukum berat bagi pengirim tki ilegal*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.liputan6.com/news/>

Ferinda K Fachri, 24 Maret 2024, *Hakim PN Ini Jelaskan 3 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses tanggal 1 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-pn-ini-jelaskan-3-model-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-lt65ff305cb9e68/>

Ferinda K Fachri, 23 Maret 2024, *Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-korporasi-sebagai-subjek-hukum-dalam-kuhp-baru>

Gita Amanda, 2018, *Faktor Ekonomi Penyebab Utama Warga jadi TKI*, diakses tanggal 20 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/>

- Godam64, 2013, *Alasan Penyebab Seseorang Menjadi TKI ke Luar Negeri*, diakses tanggal 23 Oktober 2023, <http://www.organisasi.org/>
- Ine Ventryna, 14 Desember 2010, Diperbarui 12 Juli 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sektor Pembantu Rumah Tangga Di Luar Negeri*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Jangkar Global Group, 2022, *Daftar TKI 2023 : Panduan Lengkap untuk Para Pekerja Migran*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>
- Jangkar Global Group, 2023, *penyalur tki resmi*, diakses tanggal 12 November 2023, <https://jangkargroups.co.id/>
- Lawyer Online, 6 November 2017, *Pengirim TKI Ilegal Diancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp 15 Miliar Sen*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>
- Lisdya Shelly, 20 December 2018, *Selain Faktor Ekonomi banyak Pesaing jadi Penyebab Banyaknya TKI*, diakses tanggal 25 Oktober 2023, <https://malangvoice.com/>
- Mochamad Januar Rizki, 12 Desember 2022, *Kupas Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/>
- Muhammad Iqbal Iskandar, 13 Oktober 2022, *isi pasal 263 kuhp tentang pemalsuan dokumen*, diakses tanggal 1 Maret 2024, <https://tirto.id/>
- Mys, 24 Juni 2011, *Sebuah kasus pidana pengiriman tki*, diakses tanggal 24 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/>
- Pantau PJTKI, 2016, *Hak dan Kewajiban TKI*, diakses tanggal 1 Oktober 2023, <https://buruhmigran.or.id/>
- Peraturan Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi. PER-14, diakses tanggal 1 November 2023, <https://jdih.kemnaker.go.id/>
- RFQ, 3 Maret 2015, *Pemalsuan Dokumen Pengiriman TKI Masih Marak*, diakses 3 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/>
- Tim Hukum Online, 2022, *hak pemilik data pribadi*, diakses tanggal 1 November 2023, <https://www.hukumonline.com/>